



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Agustus 2017

Halaman: 14

Hak Keuangan DPRD Kota Tunggu APBD-P

JOGJA, BERNAS – Pencairan hak keuangan Anggota DPRD Kota Yogyakarta sesuai PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan 2017 ditetapkan.

“Meskipun menunggu persetujuan anggaran perubahan, namun hak keuangan mereka akan tetap dipenuhi mulai September,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Selasa (29/8).

Menurut dia, tambahan penghasilan untuk seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta sudah dimasukkan dalam kebijakan anggaran perubahan 2017 dan jika tidak ada perubahan rencana, maka pada Senin (4/9) akan disampaikan nota pengantar wali kota untuk anggaran perubahan 2017.

“Jika anggaran perubahan baru dapat diselesaikan akhir September, maka tambahan tunjangan akan diberikan secara rapel,” katanya.

Meski demikian, menurut Kadri, tidak semua tunjangan akan dibayarkan rutin setiap bulan.

Salah satunya adalah tunjangan resek yang hanya akan diberikan satu kali hingga akhir tahun karena dalam ketentuan hanya ada tiga kali resek per tahun.

“Dewan hanya menyisakan satu kali resek hingga akhir tahun. Dengan demikian tambahan tunjangan resek hanya akan dibayarkan sekali dengan mengacu pada aturan baru,” katanya.

Pada aturan lama, tidak ada tunjangan resek yang diberikan untuk anggota dewan, sedangkan mengacu pada aturan baru besaran tunjangan resek yang diterima bisa mencapai Rp14 juta per tahun per anggota.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menetapkan sejumlah tunjangan yang akan diberikan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek. Selain itu, masih ada uang representasi dan uang paket.

“Misalnya saja tunjangan transportasi akan diberikan Rp 7,9 juta per bulan, sedangkan tunjangan perumahan Rp 11 juta per bulan,” katanya.

Kadri menambahkan Pemerintah Kota Yogyakarta harus menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 900 juta per bulan atau Rp 3,6 miliar hingga Desember untuk memenuhi hak keuangan pimpinan dan anggota dewan. ●

Instansi		Tindak Lanjut
	(ant/phi)	<input type="checkbox"/> Untuk Dita <input type="checkbox"/> Untuk Dike <input type="checkbox"/> Jumpa Per

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005